

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan wadah atau sarana bagi warga Negara dalam turut serta untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Selain itu, partai politik juga merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain dari pada itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, pendapat umum, peranan partai politik, dan kebenaran pemilihan umum.¹

Partai politik (parpol) adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan setuju (terutama dibidang politik). Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka maupun yang berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.²

¹ Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 9.

² P.K. Poerwantana, *Partai politik di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 6.

Dalam KBBI Parpol juga berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.³

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik yang kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁴

Permulaan abad ke-20 berkembang politik di Indonesia tentang politik umat islam pertama tumbuh pergerakan politik modern yang bertujuan melepaskan diri dari penjajahan asing. Pergerakan partai politik sebagai alat perjuangan, seperti partai Sarekat Islam. Islam telah bertindak sebagai perintis dalam bidang ini. Dalam gerakan agama telah berbaur dengan orientasi politik, ekonomi dan pendidikan.⁵

Pada masa Orde Baru, politik islam mengalami perubahan disebabkan proses birokratisasi politik dan dipensiasi social. Birokratisasi menghendaki penyederhanaan partai politik, termasuk yang berazaskan islam kebijaksanaan ini dikenal dengan fusi partai tahun 1973 yang melahirkan PPP. Bagi partai islam,

³ Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 831.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 160-161.

⁵ A. Rahman Zainuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti untuk Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 1991), hlm. 69.

usaha untuk fusi dan depolitisasi politik islam dengan adanya keharusan menetapkan azas tunggal pancasila.⁶

Di zaman modern sekarang partai berjalan sesuai dengan perkembangan pemikiran masyarakat terbuka dan global bangsa-bangsa didunia dengan melihat trend kemasyarakatan. Multipartai dikalangan muslimin yang sering dianalogikan dengan madzhab islam.⁷ Multipartai itu sendiri dilakukan dengan berkoalisi antara satu partai dengan partai lain untuk membangun suatu pemerintahan yang tidak cukup dengan satu partai.

Dengan itu terbentuklah banyak partai pada masa reformasi, yang dimulai dengan pembaharuan kebijakan pemerintah interregnum B.J Habibie untuk menerapkan kembali system multipartai, sebagaimana pernah terjadi di Indonesia pada dasawarsa pertama setelah kemerdekaan. Dengan kebijakan ini, euphoria politik demokrasi dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban parpol untuk menjadikan pancasila sebagai satu-satunya asas, seperti ditetapkan pada UU keormasan 1985. Perkembangan tersebut mendorong munculnya banyak parpol, khususnya parpol-parpol islam. Dari sekitar 140-an parpol yang berdiri kemudian setelah mengalami seleksi ketat terdapat 48 parpol yang berhak mengikuti pemilu 1999. Dan dari 48 parpol hampir separuhnya adalah parpol islam.⁸

Salahsatu dari partai islam tersebut adalah PK Sejantera yang didirikan pada 20 Juli 1998 dan yang menjadi presiden pertama di PK yaitu Dr. Ir. Nurmahmudi

⁶ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993. Cet ke-1). Hlm. 31.

⁷ M. Abdurrahman, *Politik dalam Islam*, (Bandung: Tanpa Penerbit, 2015), hlm. 55.

⁸ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Kompas, 2002). Hlm.60.

Ismail. Kemudian dideklarasikan pada tanggal 09 Agustus 1998 di Jakarta, di aula Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru. Partai ini dibentuk oleh eks aktivis masjid kampus. Setelah menyelesaikan kuliah dan berkiprah dalam dunia dakwah, mereka sepakat berkumpul lagi.⁹

Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu tahun 1999. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan electoral threshold, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang.¹⁰ Karena kegagalan tersebut Partai Keadilan bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Dalam waktu relative singkat partai ini berkembang pesat, terutama pertumbuhan kader-kadernya yang slalu dibimbing dengan cara tarbiyah.

Proses politik terjadi di Kabupaten Cianjur, dimensi partai islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang berdiri sebagai cabang dari pusat, PKS Kabupaten Cianjur Pertama kali dideklarasikan pada tahun 1998 ketika sudah dideklarasikan dari Jakarta, kemudian pada tahun 1999 resmilah di Cianjur ada kepengurusan tingkat daerah yang dipelopori oleh para pemuda yang sebelumnya mereka itu menjadi aktivis dakwah kampus di luar cianjur. Ketika Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten cianjur didirikan, pertama kali yang menjadi ketuanya yaitu Ust. Ahmad Rifa'i sampai dengan kepengurusan berikutnya ketua DPD nya berubah diganti menjadi Ust. Dadan (RK Dadan SN) periode (1999-2004), kepengurusan berikutnya dipimpin oleh Pak Ahmad Fauzi (2004-2009), selanjutnya Pak Teguh

⁹ Pikiran Rakyat, Tahun 1998, "Partai Keadilan (PK)".

¹⁰ Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, ed, *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm.230.

Agung (2009-2014), dan selanjutnya Pak Wilman Singawinata periode (2015-2020).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai berbasis islam untuk ikut serta dan menjadi partai dakwah yang kokoh untuk melayani umat atau masyarakat. Menurut Aulia Sukendar tujuan dari mendirikan partai politik itu membangun atau untuk menyiapkan kader-kader pemimpin baik ditingkat kabupaten, maupun tingkat provinsi, ataupun tingkat pusat. Khususnya di Kabupaten Cianjur tentunya kehadiran Partai Keadilan Sejahtera itu untuk menyiapkan pimpinan-pimpinan di Kabupaten, misalnya untuk kader sekarang PKS mencalonkan kadernya sebagai calon Wakil Bupati karna salah satu dari tugas partai politik itu sendiri salah satunya untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin.¹¹

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa dalam Negara demokrasi, partai politik menyelenggarakan empat fungsi, yaitu partai sebagai sarana komunikasi politik, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana recruitment politik, dan partai politik sebagai sarana pengatur politik.

Fungsi partai politik berjalan baik dalam bentuk kegiatan PKS, diantaranya yaitu penggalan dan pengelolaan dana social untuk keperluan internal dan eksternal partai (baituzzakah), pelatihan mubaligh/mubaligoh dan pengajar Al-

¹¹ Wawancara dengan Aulia Sukendar, (50 tahun), Ketua Humas DPD PKS Kabupaten Cianjur, 26 Oktober 2020.

Quran bagi kader, gema keadilan, pembentukan wajah amal (yayasan), majelis hikmah untuk tokoh dan birokrat.

Terdapat beberapa alasan mengapa penulis memilih tema dan judul mengenai perkembangan partai ini. Pertama, dilatarbelakangi oleh belum adanya yang mengangkat judul mengenai Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Cianjur. Alasan selanjutnya karena ketertarikan penulis terhadap fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa partai politik mempunyai peranan dalam masyarakat maupun pemerintah, dan selanjutnya sumber-sumber pembahasan mengenai perkembangan partai politik ini terdapat dalam jangkauan penulis, sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahannya ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih *Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Cianjur tahun 1999-2014*, sebagai judul Skripsi untuk diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah agar permasalahan dan penelitian ini lebih terfokus, maka dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Cianjur?

2. Bagaimana Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Cianjur Tahun 1999-2014?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Cianjur.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Cianjur Tahun 1999-2014.

D. Kajian Pustaka

Untuk penelitian ini, dikumpulkan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang penulis tulis, diantaranya sumber yang berhubungan dengan judul tersebut yang akan saya bahas. Ada pula beberapa karya ilmiah yang sama kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian tersebut dijadikan bahan perbandingan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama studi pustaka yang berjudul *Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung Tahun (1999-2014)*, karya Farihat Hoiriyah dalam skripsinya tahun 2017 di Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini mendeskripsikan proses pendirian dan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bandung Tahun 1999-2014. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian sejarah, diantaranya heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi.